

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari potensi plagiarisme atau duplikasi hasil penelitian sebelumnya, peneliti menyajikan pemaparan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Peneliti mengkaji berbagai sumber dan literatur yang relevan untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang sudah ada, sehingga dapat mempertegas kontribusi baru yang akan diberikan dalam penelitian ini.

- 1) Nita Ariyani (2019) Penelitian berjudul “Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori *Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*” ini mengkaji pengaturan yuridis yang mempengaruhi penataan pasar tradisional di Indonesia secara keseluruhan. Ditelaah melalui pendekatan norma hukum dan teori struktural hukum.
- 2) Dedi Haryadi, (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. Penelitian ini membahas tentang munculnya kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dengan realisasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu arahan pola ruang RTRW terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen.

- 3) Yemny M. Djafar Lipung, (2018) Penelitian kualitatif-deskriptif mengenai “Peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang, Makassar”. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pasar tradisional oleh pemerintah setempat.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: 1) tempat penelitian yang akan dilakukan, penelitian akan melakukan penelitian di Pasar Panorama, Kota Bengkulu. 2) Pada penelitian ini peneliti menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang di pasar panorama kota Bengkulu dalam mengatasi masalah lingkungan dan infrastuktur.

2.2 Kerangka Konsep Dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menjadi elemen krusial dalam mengatur pasar sebagai ruang ekonomi yang dinamis. Proses ini mencakup penerapan regulasi, pengelolaan infrastruktur, hingga pemberdayaan pedagang untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan berkelanjutan. Menurut Nugroho (2018), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk merealisasikan keputusan politik menjadi dampak nyata bagi masyarakat.

Pasar tradisional sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakteraturan tata ruang, dan permasalahan lingkungan. Setyawan (2018) mengungkapkan bahwa banyak pasar di Indonesia belum memiliki sistem drainase yang memadai, sehingga menyebabkan banjir dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan penataan ruang menjadi penting untuk memperbaiki kondisi fisik pasar dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Selain aspek struktural, keterlibatan stakeholder juga memegang peranan penting. Wahyuni (2019) mengatakan bahwa partisipasi aktif pedagang dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan zonasi dan pengelolaan sampah. Ini sejalan dengan teori governance yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam proses implementasi kebijakan. Kendala implementasi sering kali muncul dari keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan ini.

Pratama, (2022) menekankan perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas lingkungan pasar. Data empiris dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan publik di sektor pasar juga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

George C. Edward III mengemukakan bahwa teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III menjadi salah satu model yang paling berpengaruh dalam studi kebijakan publik. Teori ini mengidentifikasi empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam mengubah keputusan politik menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) dipandang relevan karena mampu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif oleh pelaksana teknis di lapangan. Teori

ini menitikberatkan pada empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut sangat sesuai untuk digunakan dalam menilai pelaksanaan kebijakan penataan Pasar Panorama oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, yang bertanggung jawab dalam mengatur zonasi dagang, fasilitas umum, serta mengelola hubungan antara pemerintah dengan pedagang pasar.

Melalui indikator komunikasi, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana informasi mengenai kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten kepada para pedagang. Indikator sumber daya digunakan untuk melihat kecukupan anggaran, tenaga kerja, dan sarana penunjang yang disediakan oleh Disdagrin. Disposisi pelaksana akan mencerminkan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan seperti petugas UPT pasar, sementara struktur birokrasi mengkaji efektivitas prosedur dan koordinasi internal dalam mendukung implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, pendekatan dari Edward III sangat tepat digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar secara menyeluruh, khususnya dalam lingkup pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

a) Komunikasi

Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana di lapangan. Edward III menekankan bahwa kebijakan yang disusun secara detail harus disosialisasikan secara jelas dan konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang menyimpang. Dalam konteks pengelolaan pasar, misalnya, regulasi

terkait zonasi atau kebersihan harus disampaikan secara langsung dan terperinci kepada pedagang agar mereka dapat mematuhi dengan sadar.

b) Sumber Daya

Sumber daya mencakup aspek finansial, SDM, sarana, dan waktu yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan berisiko gagal meskipun kebijakan tersebut dirancang dengan sangat baik.

c) Disposisi Pelaksana

Disposisi gabungan dari sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh aparat atau petugas lapangan yang memiliki sikap positif cenderung lebih berhasil karena mereka akan melaksanakan tugas dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, jika ada resistensi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan, proses implementasi bisa terhambat bahkan terhenti.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup prosedur, dan mekanisme koordinasi dalam organisasi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan. Struktur yang terlalu kaku atau birokrasi yang berbelit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan struktur yang fleksibel namun tetap memiliki kontrol yang kuat untuk menghindari kebocoran atau penyimpangan.

Keterkaitan Empat Faktor dalam Implementasi Edward III menekankan bahwa keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi.

Misalnya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksesuaian persepsi, meskipun sumber daya tersedia. Begitu pula, struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksana yang sebenarnya memiliki motivasi tinggi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang memperhatikan semua faktor ini menjadi kunci sukses implementasi kebijakan.

Michael Lipsky, (1980) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan relevan jika menggunakan model Bottom-UP. Pengertian Model Bottom-Up Michael Lipsky dalam bukunya *Street-Level Bureaucracy* (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keputusan di tingkat atas (top-down), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Aktor ini disebut sebagai *street-level bureaucrats*, seperti petugas lapangan, pegawai dinas, dan pengelola pasar, yang sering kali membuat keputusan harian yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara nyata.

Peran Aktor Lapangan Dalam model ini, para aktor lapangan memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, dalam konteks penataan pasar, pengelola pasar atau petugas dinas kebersihan dapat mengatur tata letak lapak atau jadwal pembersihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, meskipun tidak selalu sesuai persis dengan ketentuan formal.

Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Lipsky menekankan pentingnya diskresi, yaitu kebebasan membuat keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Diskresi ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan praktis yang tidak selalu bisa diantisipasi saat kebijakan dirancang. Dalam kasus pasar, petugas mungkin

perlu memprioritaskan penertiban pedagang yang mengganggu arus lalu lintas meskipun aturan resminya menyebutkan penertiban serentak.

Keterbatasan Sumber Daya dan Realitas Lapangan Model bottom-up juga mengakui bahwa aktor lapangan sering kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja. Dalam penataan pasar, keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur atau kekurangan personel pengawasan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga solusi praktis sering kali diambil untuk mengatasi kekurangan ini.

Adaptasi terhadap kondisi lokal keunggulan model bottom-up adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika lokal. Misalnya, jika sebuah pasar memiliki tantangan unik, seperti seringnya banjir, pengelola pasar bisa berinisiatif membuat saluran air darurat atau mengatur ulang zona dagang tanpa harus menunggu keputusan birokrasi yang lebih tinggi.

Kelebihan Model Bottom-Up Model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam implementasi kebijakan, memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan aktor lokal yang memahami konteks lapangan, kebijakan menjadi lebih relevan dan realistis. Kekurangan dan Tantangan Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan. Diskresi yang terlalu luas bisa menyebabkan perbedaan perlakuan antarwilayah atau antartetugas. Dalam konteks pasar, ini bisa memunculkan ketidakadilan jika satu kelompok pedagang diberi kelonggaran sementara yang lain ditertibkan secara ketat. Pentingnya Pelatihan dan Pengawasan Agar model ini berjalan efektif, penting untuk memberikan pelatihan

yang memadai kepada aktor lapangan dan mengadakan pengawasan berkala. Dengan cara ini, diskresi tetap ada, tetapi dalam koridor yang selaras dengan tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Mengoptimalkan Pendekatan Bottom-Up Model kebijakan bottom-up menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks pasar, melibatkan aktor lokal dan memberi mereka kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan bisa menjadi kunci sukses. Namun, diperlukan keseimbangan antara diskresi dan pengawasan agar kebijakan tetap konsisten dan berkeadilan.

Brundtland Report, (1987) menjelaskan Teori Pembangunan Berkelanjutan merupakan indikator yang tepat digunakan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

- a. Dimensi Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan Aspek ekonomi dalam teori ini mengacu pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan harus dirancang untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses ke sumber daya ekonomi. Dalam konteks pasar, ini bisa berarti meningkatkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perdagangan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

- b. Dimensi Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan Dimensi sosial menekankan pentingnya keadilan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat, termasuk kelompok rentan. Di pasar tradisional, ini berarti melibatkan pedagang kecil dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang.
- c. Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Aspek lingkungan menjadi pilar utama dalam teori ini. Pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Dalam konteks pasar, ini bisa berarti pengelolaan limbah yang baik, pengurangan polusi, dan penggunaan material ramah lingkungan untuk infrastruktur pasar.

Keterkaitan Ketiga Dimensi Ketiga dimensi ini saling terkait dan harus dijalankan secara bersamaan. Misalnya, peningkatan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berkelanjutan harus mengintegrasikan ketiga elemen ini secara seimbang.

Ansell & Gash (2007), mengukur indikator Implementasi Kebijakan dengan cara menggunakan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor-aktor dari sektor publik dan swasta, termasuk masyarakat sipil, yang bekerja bersama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Proses ini dilakukan melalui interaksi yang berkesinambungan, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, saling percaya,

dan tujuan bersama.

Elemen Kunci *Collaborative Governance* Menurut Ansell & Gash, ada empat elemen penting dalam *collaborative governance*:

- a. Dialog tatap muka,
- b. Pembangunan kepercayaan
- c. Komitmen terhadap proses
- d. Pemahaman bersama.

Dialog memungkinkan aktor-aktor untuk berbagi perspektif, sementara kepercayaan mempererat kerja sama. Komitmen terhadap proses menjaga partisipasi tetap stabil, dan pemahaman bersama membantu meredam konflik. Teori *collaborative governance* menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan publik yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan dialog, membangun kepercayaan, dan merangkul keberagaman aktor, pemerintah dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat luas, termasuk dalam konteks penataan ruang pasar.

Berbagai macam indikator pengukuran Implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Panorama oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bengkulu Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Dan Infrastruktur.

Indikator pengukuran Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) meliputi empat indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori implementasi kebijakan Edward III memberikan panduan yang kuat dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan publik. Dengan memastikan komunikasi yang jelas, menyediakan sumber daya yang cukup, membangun disposisi positif, dan merancang struktur birokrasi yang mendukung, kebijakan publik termasuk penataan ruang pasar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

2.2.2 Konsep Penataan Pasar

Penataan pasar merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang bertujuan menciptakan lingkungan yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan fungsi wilayah tertentu. Menurut peraturan daerah Kota Bengkulu (Perda Kota Bengkulu) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat mengatur tentang tata kelola pasar rakyat termasuk zonasi dagang, penempatan kios/lapak, fasilitas umum pasar, dan peran pemerintah daerah dan UPT pasar. Dalam konteks pasar, penataan ruang berfungsi untuk mengatur zonasi dagang, sirkulasi pengunjung, fasilitas umum, dan mitigasi risiko lingkungan seperti banjir atau sampah.

Penataan pasar rakyat tidak dapat dipisahkan dari peran instansi teknis di tingkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berfungsi sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan penataan pasar, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Ketentuan tersebut diperkuat oleh regulasi nasional seperti Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 70 Tahun 2013 yang mengatur penataan zonasi, sirkulasi, dan fasilitas pasar tradisional.

Penataan ruang pasar harus berlandaskan pada prinsip efisiensi ruang, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Subekti (2020) berpendapat bahwa pasar tradisional di Indonesia sering mengalami masalah tata ruang yang tidak terstruktur, sehingga mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Oleh karena itu, prinsip penataan ruang pasar harus memperhatikan faktor ergonomis, zonasi yang jelas, serta akses yang mudah bagi masyarakat.

Hidayat, (2019) menjelaskan bahwa perencanaan pasar yang baik akan meningkatkan efektivitas perdagangan, mengurangi konflik antar-pedagang, serta meningkatkan daya tarik pasar bagi konsumen. Perencanaan yang matang juga mencakup aspek drainase, pengelolaan limbah, dan sirkulasi udara untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Konteks perencanaan, penataan ruang pasar harus mempertimbangkan aspek kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pasar tradisional di banyak kota di Indonesia sering menghadapi masalah tata ruang yang tidak tertata dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh Prasetyo, (2021) bahwa penyebab utama ketidakteraturan tata ruang pasar adalah kurangnya pengawasan dalam implementasi kebijakan tata ruang, tingginya jumlah pedagang kaki lima yang tidak terorganisir, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti tempat parkir dan jalur pejalan kaki.

Penataan ruang yang buruk dapat berdampak pada lingkungan sekitar pasar,

seperti meningkatnya volume sampah, drainase yang tersumbat, dan polusi udara akibat kepadatan aktivitas dagang. Menurut penelitian oleh Sari et al. (2022), pasar yang tidak tertata dengan baik cenderung menghasilkan limbah yang sulit dikendalikan, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berkurangnya kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan aspek keberlanjutan dalam perencanaan ruang pasar.

Infrastruktur pasar, seperti jalan, tempat parkir, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya, memiliki peran penting dalam menciptakan pasar yang tertata dan nyaman. Nugroho, (2020) berpendapat bahwa peningkatan infrastruktur pasar dapat meningkatkan kenyamanan pembeli serta produktivitas pedagang. Infrastruktur yang baik juga berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pasar yang tidak terkendali. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi implementasi penataan ruang pasar. Menurut Susanto (2021), banyak pasar tradisional di Indonesia masih mengalami kendala dalam penerapan kebijakan tata ruang akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Diperlukan regulasi yang lebih tegas serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar kebijakan tata ruang dapat berjalan optimal.

Wahyuni, (2023) mengatakan bahwa kepadatan pedagang dan kurangnya fasilitas umum menyebabkan pasar ini sering mengalami kemacetan dan permasalahan lingkungan. Upaya revitalisasi dengan pendekatan zonasi dan peningkatan infrastruktur telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, namun masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar implementasi kebijakan

dapat berjalan dengan baik. Pasar Panorama di Kota Bengkulu merupakan salah satu contoh pasar yang mengalami tantangan dalam penataan ruang.

2.2.3 Konsep Pasar

Pasar merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ekonomi yang berperan sebagai wadah interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Menurut Kotler dan Keller (2016), pasar dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Proses ini melibatkan mekanisme penawaran dan permintaan yang menentukan harga dan distribusi sumber daya. Pasar tidak hanya menjadi tempat fisik, tetapi juga mencakup ruang digital dan virtual yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Laudon dan Traver, (2020) mengatakan bahwa *e-commerce* memperluas jangkauan pasar secara signifikan, memungkinkan konsumen untuk mengakses produk global tanpa batas geografis.

Terdapat berbagai jenis pasar yang diklasifikasikan berdasarkan struktur dan karakteristiknya, seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Masing-masing jenis pasar ini memiliki dinamika yang berbeda dalam hal jumlah pelaku, kekuatan tawar-menawar, dan hambatan masuk pasar. Dalam konteks ekonomi lokal, pasar tradisional sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Suryani, (2018) mengatakan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempererat hubungan antar anggota komunitas.

Pasar yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong inovasi melalui kompetisi. Pasar juga memiliki

dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pasar tidak selalu sempurna. Kebijakan publik yang tepat dapat memperbaiki distorsi dan memastikan pasar beroperasi secara optimal. Perubahan tren konsumen juga memengaruhi dinamika pasar. Dalam buku berjudul *Consumer Behavior: Buying, Having, And Being* oleh Solomon, (2021) menunjukkan bahwa preferensi konsumen yang terus berkembang mendorong perusahaan untuk beradaptasi melalui diferensiasi produk dan strategi pemasaran yang inovatif. Selain itu, globalisasi telah mengubah lanskap pasar secara signifikan.

2.2.4 Konsep Tata Ruang Pasar Panorama

Pasar Panorama merupakan salah satu pasar utama di Kota Bengkulu yang memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi lokal. Sebagai pusat perdagangan, pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat setempat. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya tarik Pasar Panorama, konsep pengelolaan Pasar Panorama juga menjadi fokus penting. Implementasi kebijakan pengelolaan pasar ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan terkait, implementasinya belum optimal. Masalah seperti pedagang yang berjualan di badan jalan dan penertiban yang tidak rutin masih menjadi tantangan utama.

Penerapan sistem satu arah di dalam konsep penataan ruang pada pasar ini diharapkan dapat mengatur alur lalu lintas dan mencegah kekacauan. Dalam hal ini keterlibatan partisipasi semua pihak sangat penting dalam penataan pasar. Pendekatan yang melibatkan partisipasi, regulasi, dan modernisasi dianggap efektif dalam menata pasar tradisional. Setiap pasar memiliki karakter dan masalah yang

berbeda, sehingga penataannya memerlukan perlakuan yang berbeda pula.

Dari perspektif tata ruang, Pasar Panorama terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, dengan topografi dataran dan persawahan. Lokasinya yang strategis menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman penduduk, sehingga penataan ruang yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung fungsinya. Tidak hanya itu terkadang konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan pemerintah daerah terkait penataan ruang pada pasar juga menjadi perhatian.

PKL seringkali berjualan di pinggir jalan, menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban. Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah seringkali tidak efektif karena kurangnya fasilitas yang memadai bagi PKL. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan Pasar Panorama harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Penyediaan kios yang tertata baik, penambahan sarana prasarana, ruang terbuka hijau, pengelolaan lahan parkir, dan sirkulasi angkutan umum yang baik diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli.

Optimalisasi retribusi pasar juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan Pasar Panorama. Penertiban pedagang melalui peraturan daerah bertujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan integrasi aspek tata ruang yang baik, diharapkan Pasar Panorama dapat berkembang menjadi pasar tradisional yang modern, tertata, dan tetap mempertahankan identitas budaya Kota Bengkulu.